

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HILMAN SAHRIZAL
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN
3. NHK : 839602

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA AE 101 R GREAT COROLLA SE Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT D 1BO2N12L2 A/T BEAT Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SE 88/MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.200.479

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 588.100.479

III. HUTANG Rp. 198.695.467

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 389.405.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.